

BAB II

KONFLIK INTERNAL DI SIERRA LEONE

A. Pengertian Konflik Internal

Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Konflik merupakan suatu kenyataan hidup yang tidak terhindarkan. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan sebagaimana mestinya dan seringkali konflik diselesaikan dengan jalan kekerasan.¹

Menurut kaum Fungsionalis, konflik terjadi karena adanya perubahan-perubahan yang kompleks dalam perangkat-perangkat pranata sosial yang tidak mampu menyediakan kebutuhan dasar bagi masyarakatnya.² Perubahan ini membawa konsekuensi perebutan sumber kebutuhan yang terbatas dan mengakibatkan terbukanya konflik. Fungsionalis juga mempunyai banyak persamaan dengan kaum sosiolog Marxis yang secara tegas mengatakan bahwa fungsi utama dari pranata sosial adalah pemecahan terhadap segala kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan dan papan.³

Ketika dua atau lebih kelompok yang terlibat dalam konflik saling berhadapan kemudian melakukan kontak satu dengan yang lain yang bersifat saling mengancam, menyakiti, menghancurkan dan saling mengontrol antara satu dengan yang lain, maka situasi seperti ini dikenal dengan konflik bersenjata atau sering juga dikenal sebagai konflik terbuka atau puncak dari sebuah krisis.

Pencermatan terhadap konflik bersenjata dengan mengacu pada pendekatan "*inter-state system*" bisa dibuat klasifikasi; ada yang bisa dikenali sebagai konflik antar negara (*inter-state conflict*) dan konflik dalam wilayah (*intra-state conflict*) serta konflik yang merupakan gabungan dari keduanya. *Intra-state conflict* bisa didefinisikan sebagai konflik yang terjadi dalam wilayah suatu negara, biasanya konflik ini termanifestasi dalam dua bentuk. Pertama,

¹ Hugh Miall at all, *Contemporary Conflict Resolution, The Prevention, Management and Transformation of Deadly Conflict*, Polity Press, 1999, hal 21- 22.

² Seymour Martin Lipset, *Consensus and Conflict, Essays in Political Sociology*, New Jersey, 1985, hal 48.

³ *Ibid.*

konflik antara kekuatan pemerintah dengan kekuatan yang memaksakan keinginannya untuk mendapatkan otonomi atau apa yang sering dikenal sebagai kelompok separatis. Kedua, konflik yang berkenaan dengan komposisi dan bentuk dari pemerintahan, yang biasanya melibatkan kelompok-kelompok sipil. Konflik ini biasanya mengacu pada garis kelompok etnik, bahasa, agama, budaya. Jika konflik ini kemudian saling tumpang tindih dan akhirnya melampaui batas-batas negara, maka besar kemungkinannya konflik ini akan menjelma menjadi konflik antar-negara.⁴

Konflik juga bisa dikenali dari besarnya korban yang terjadi, Berdasarkan *The Swedish International Peace Research Institute (SIPRI)* dan *Department of Peace and Conflict Research* di Universitas Upsala Swedia, misalnya memberi definisi dari kategori konflik. Disini definisinya didasarkan pada skala dari konflik dan besarnya jumlah korban dari konflik tersebut. Kalau konflik yang terjadi melebihi 1000 orang, maka konflik tersebut dikategorikan sebagai sebuah perang atau konflik bersenjata yang besar. Jika korbannya 25 dan 1000 dalam tahun-tahun puncak konflik, kemudian dalam fase peperangan bisa melampaui 1000, maka ini dikenal dengan konflik yang menengah.⁵

Dilihat dari derajat intensitas kerusuhan yang terjadi, jika hanya bersifat sporadis dan intensitasnya rendah, maka hal ini dikenal dengan *Low Intense Conflict* / konflik dengan intensitas yang rendah. Sebaliknya, jika sebuah konflik sudah memiliki intensitas yang tinggi, mengakibatkan kerusakan yang besar memobilisasi kekuatan bersenjata, maka konflik ini diberi label sebagai "*Serious Dispute*". Pasca Perang Dingin, dalam lima dekade terakhir terjadi peningkatan yang luar biasa dari konflik-konflik *intra-state*. Bahkan frekuensi dari konflik *intra-state* jauh lebih tinggi dibandingkan dengan frekuensi dari konflik *inter-state*.⁶

Pasca Perang Dingin ditandai dengan semakin meningkatnya perang sipil dan konflik bersenjata dalam negara⁷ yang mengancam keamanan dan

⁴ I Nyoman Sudira, Teori Konflik: Sebuah Penghampiran dan Dasar Pemahaman dalam *Jurnal Pacis* No.2 Thn 1, 2003, hal 60.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Konflik tersebut bisa saja terjadi karena faktor sejarah permusuhan antar dua negara yang telah lama berakar atau antar negara yang dulunya merupakan satu kesatuan yang kemudian terpisah karena adanya suatu perbedaan seperti perbedaan identitas, seperti yang terjadi pada konflik antara India dengan Pakistan.

perdamaian internasional serta menyebabkan penderitaan umat manusia dalam jumlah yang besar.⁸

Konflik yang terjadi saat ini, bisa dikatakan sebagai konflik/perang model ketiga⁹, setelah Perang Dunia I dan Perang Dunia II sebagai model yang pertama dan kedua. Jika pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, penyebabnya adalah faktor eksternal seperti politik, pertahanan, keamanan, kepentingan ekspansi ekonomi dan ideologi, maka konflik model ketiga lebih banyak disebabkan oleh faktor internal dan primordial.

Konflik internal terlihat lebih destruktif, tidak rasional dan tidak terkontrol karena:¹⁰

1. tidak adanya lembaga otoritatif yang *legitimate*/resmi dalam negara yang mampu menekan kelompok-kelompok yang bertikai untuk menghentikan tindakan destruktifnya, apalagi jika pemerintah di negara tersebut juga merupakan bagian darinya,
2. kesukaran pihak eksternal untuk langsung melakukan intervensi kemanusiaan kedalam area konflik dengan alasan kedaulatan negara. Sebaliknya konflik juga akan semakin berlarut jika motivasi intervensi kemanusiaan disusupi oleh adanya kepentingan oportunistik.

Kendati bersifat internal, akses dari konflik tersebut jauh lebih besar dari model perang klasik yang melahirkan dampak krusial bagi sistem keamanan dan perdamaian internasional, baik dalam hal ekonomi, sosial, politik dan juga militer. Akibat dari konflik internal yang sudah pernah terjadi, antara lain adalah: tewasnya jutaan orang seperti pada kasus di Rwanda, Burundi, Yugoslavia, Uni Soviet, Somalia, Turki dan masih banyak lagi. Bahkan sampai saat ini aliran arus pengungsi manusia yang belum tertangani akibat dari konflik internal tersebut mencapai lebih dari 20 juta orang.¹¹

⁸ Penelitian yang dilakukan oleh Wallensteen dan Sollenberg menunjukkan bahwa dari 110 konflik utama yang melibatkan kekerasan bersenjata pada tahun 1990 – 1999, hanya 7 konflik yang merupakan konflik antar negara (interstate) dan 103 sisanya merupakan konflik internal. Kecuali kasus Perang Teluk dan Afghanistan, hampir semua perang yang terjadi pasca Perang Dingin merupakan konflik internal di suatu negara, sedangkan konflik klasik antar negara sangat jarang terjadi. (Andi Widjajanto, “Perang Internal dalam Proses Pembentukan Negara-Bangsa” dalam *Analisis CSIS*, tahun XXX/2001, No.1, hal 46)

⁹ K.J.Holsti, *The State, War & The State of War*, Cambridge:CUP, 1996, hal 28-40.

¹⁰ Hans Arnold, “The Century of the Refugee”, dalam *A European Country Aussen Pol*, Vol 42 No 3, Quarter 1991, hal 275.

¹¹ *Ibid.*

Konflik internal merupakan pertikaian politik yang diikuti dengan kekerasan yang dapat dilacak pada umumnya berasal dari faktor-faktor yang bersumber dari dalam negara (*intrastate*) daripada antar negara (*interstate*).¹² Yang termasuk dalam konflik internal antara lain adalah; *power struggle* yang melibatkan pemimpin-pemimpin sipil atau militer, ancaman-ancaman organisasi kriminal terhadap kedaulatan negara, dan pergerakan ideologi, konflik etnis dan juga kampanye-kampanye pemisahan diri dari suatu negara.

Pada umumnya dalam konflik internal, aktor-aktor kuncinya adalah pemerintah dan kelompok-kelompok pemberontakan, tetapi ketika struktur negara lemah atau tidak ada, konflik horizontal antarkelompok dapat terjadi. Beberapa konflik internal juga didasarkan dari kombinasi permasalahan ideologi, kriminal, politik dan juga etnis serta beberapa konflik juga berubah-ubah.

Secara umum, Brown mengidentifikasi empat faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam konflik internal, yaitu; struktur, politik, sosial/ekonomi dan kultur.¹³ Keempat faktor tersebut dapat menjadi penyebab utama (*underlying causes*) dan juga penyebab pemicu (*proximate causes*).

¹² Michael E. Brown, "Ethnic and Internal Conflicts", dalam Chester A. Crocker, Fen Osler, Hampson, dan Pamela Aall (ed.), *Turbulent Peace: The Challenges of Managing International Conflict*, (Washington D.C.: United States Institute of Peace Press, 2001), hal.212.

¹³ Michael E. Brown (eds), *The International Dimensions of Internal Conflict*, Cambridge: MIT Press, 1996, hal.13-14.

Tabel 2.1
Empat Faktor Penyebab Konflik Internal

Faktor	<i>UNDERLYING CAUSES</i> (PENYEBAB UTAMA)	<i>PROXIMATE CAUSES</i> (PENYEBAB PEMICU)
Struktur	<ul style="list-style-type: none"> • Negara lemah • Konsentrasi pada keamanan Intra-state dan terjadinya <i>security dilemma</i> • Demografi etnik 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara <i>collaps</i> / lumpuh • Perubahan perimbangan militer dalam negara • Pola atau bentuk perubahan demografi
Politik	<ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi politik • Ideologi nasional • Dinamika politik antar kelompok 	<ul style="list-style-type: none"> • Transisi Politik • Berkembangnya pengaruh ideologi / paham nasional • Bertumbuhnya kompetisi antar kelompok • Pertentangan para pemimpin yang makin intensif
Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Masalah ekonomi • Sistem ekonomi yang diskriminatif • Modernisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Permasalahan ekonomi yang menggunung • Timbulnya kesenjangan ekonomi • Percepatan pembangunan dan modernisasi
Kultur	<ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi budaya • Problem historis 	<ul style="list-style-type: none"> • Diskriminasi kultur yang makin intensif • Pertentangan dan propaganda etnis

Faktor pertama yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam konflik internal adalah faktor struktur. Faktor ini disebabkan oleh tiga hal;

- (i) negara lemah, konsentrasi keamanan dalam negeri yang dilakukan oleh setiap kelompok identitas yang berbeda, sehingga melahirkan dilema keamanan dan geografi etnik. Negara lemah mengakibatkan institusi politik lemah, legitimasi rendah dan pemikiran politik terkotak-kotak. Jika legitimasi rendah, maka kemampuan negara untuk mengatur masyarakatnya pun melemah karena legitimasi pada dasarnya merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik.¹⁴ Menurut Max Webber, tanpa adanya legitimasi, maka aturan, regim atau pemerintahan yang ada akan mengalami kesulitan dalam mengelola konflik demi terciptanya stabilitas dan pemerintahan yang baik.¹⁵
- (ii) konsentrasi keamanan kelompok tertentu akan melahirkan dilema keamanan dan ketegangan dengan kelompok lainnya yang berbeda identitas. Kelompok A akan menginterpretasikan konsentrasi keamanan yang dilakukan oleh kelompok B sebagai upaya mempersiapkan perang dan karenanya harus diimbangi dengan konsentrasi kekuatan pula. Begitu pula sebaliknya, meskipun belum tentu sesungguhnya konsentrasi tersebut dipersiapkan untuk perang melainkan sekedar untukantisipasi atau upaya pertahanan belaka. Hal ini mengakibatkan setiap kelompok akan meningkatkan intensitas dan kekuatan militernya. Jika mereka tidak melakukan hal tersebut, ada kekhawatiran terjadi penyerangan terhadap mereka. Kondisi seperti ini melahirkan adanya suatu dilema keamanan; bersiap diri dianggap memancing peperangan, berdiam diri menjadi santapan mudah.
- (iii) adanya pembagian atau pembatasan wilayah berdasarkan etnik tertentu atau demografi etnik.¹⁶ Sekelompok etnik yang secara khusus mendiami sebuah wilayah tertentu dalam suatu negara bisa menimbulkan ancaman

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.

¹⁵ Joseph Bensman, "Max Webber's Concept of Legitimacy: An Evaluation", dalam Arthur J. Vidich dan Ronald M. Glassman (eds.), *Conflict and Control: Challenge to Legitimacy of Modern Governments*, California: Sage Publications, 1979, hal. 17-47.

¹⁶ *Op.Cit.*, Michael E. Brown (eds), *The International Dimensions of Internal Conflict*, hal.17.

pemisahan diri. Keinginan tersebut dapat terwujud dengan mudah karena mereka didukung kekuatan infra dan supra struktur di wilayah tersebut. Masalah menjadi rumit karena biasanya pemerintah pusat selalu menolak permintaan untuk memisahkan diri tersebut. Apabila negara yang bersangkutan memiliki institusi manajemen konflik yang sudah mapan, maju dan demokratis, maka konflik dapat diselesaikan secara positif atau konstruktif. Tetapi apabila itu terjadi dalam negara dunia ketiga yang mayoritas belum mencapai pada tahap kematangan demokrasi, maka konflik akan menjadi negatif atau destruktif.

Faktor kedua penyebab terjadinya kekerasan dalam konflik internal adalah faktor politik. Faktor ini juga terjadi disebabkan oleh tiga hal, yaitu diskriminasi, pertentangan mengenai ideologi nasional dan dinamika politik antar kelompok.¹⁷ Adanya diskriminasi politik dari pemerintah berkuasa atau kelompok mayoritas terhadap kelompok tertentu atau kaum minoritas akan menimbulkan solidaritas anggota kelompok etnis tertindas untuk mengadakan perlawanan. Ideologi nasional dapat menjadi penyebab timbulkan kekerasan konflik internal apabila tidak menampung dan melindungi seluruh kepentingan kelompok dan identitas yang ada atau hanya didasarkan pada kepentingan kelompok yang berkuasa saja. Begitu pula dengan dinamika politik yang terjadi antar kelompok masyarakat. Jika dinamika politik kelompok didasarkan pada semangat primordialisme maka aktivitas politik akan menjadi wadah bagi kekerasan. Sebaliknya, jika dinamika tersebut dibangun atas dasar kepentingan nasional secara keseluruhan, maka semua kepentingan masyarakat akan terwakili, sehingga kekerasan dapat dihindari.

Sedangkan faktor yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sosial dapat menyebabkan terjadinya konflik internal, apabila;¹⁸

1. negara atau masyarakat yang bersangkutan memiliki permasalahan ekonomi yang menumpuk sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat dan melahirkan berbagai gejala dan tindakan kekerasan. Pertumbuhan ekonomi yang lambat, stagnan,

¹⁷ *Ibid*, hal.18-19.

¹⁸ *Ibid*.

merosot dan kolaps dapat membuat masalah destabilisasi semakin besar.

2. sistem ekonomi yang berlaku sangat diskriminatif atau terjadi ketimpangan sosial yang tajam antara kelompok yang kaya dan kelompok masyarakat biasa.
3. adanya modernisasi ekonomi dalam skala global yang memberikan dampak pada kehidupan ekonomi domestik. Modernisasi dapat menciptakan konflik apabila masyarakat tidak atau belum siap menghadapi perubahan yang ada secara drastis sementara perubahan tersebut tidak mungkin dihindari.

Faktor terakhir yang dapat menyebabkan terjadinya konflik internal adalah kultur.¹⁹ Kultur dapat menjadi penyebab apabila terjadi diskriminasi budaya terhadap kelompok tertentu atau ada problem historis antara satu kelompok dengan kelompok lain yang belum tertuntaskan. Semakin kuat pemerintah pusat menekan atau mengabaikan inisiatif kelompok minoritas, maka semakin kuat pula radikalisme pemisahan diri.²⁰ Pertentangan yang melibatkan kultur ini memiliki dampak yang lebih besar dibanding faktor-faktor yang lain, karena pada dasarnya identitas kultur seseorang/ kelompok tidak akan pernah bisa dirubah.

B. Konflik Internal Sierra Leone

Nama Sierra Leone diambil dari bahasa Portugis, yang berarti “singa gunung”, sesuai dengan deretan pegunungan menyerupai singa yang terletak di sepanjang semenanjung Freetown.²¹ Bangsa Portugis sendiri merupakan bangsa Eropa pertama yang memasuki wilayah Sierra Leone. Wilayah Sierra Leone berbatasan dengan Liberia di bagian Tenggara, Republik Guinea di

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Wolfgang Danspeckgruber, “Self-Determination, Self-Governance and Security”, *International Relations*, Vol.XV, No.1, April 2000, hal.18.

²¹ “Sierra Leone”, http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/sierra_leone.htm diakses pada 5 April 2008, pk.14.35

bagian Utara, serta dengan Samudera Atlantik di bagian Barat. Luasnya kurang lebih 72.325 km persegi, dengan populasi sekitar lima juta jiwa.²²

Dari keseluruhan populasi di Sierra Leone, di bagian utara didominasi oleh mayoritas etnik Temne, sementara di bagian selatan dan tenggara didominasi oleh etnik Mende.²³ Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, meskipun juga terdapat kelompok masyarakat yang beragama Kristen. Bahasa resmi yang digunakan di Sierra Leone adalah bahasa Inggris. Sejak tahun 1808, Freetown menjadi wilayah koloni Inggris dan di tahun 1896, seluruh wilayah Sierra Leone resmi menjadi koloni Inggris.²⁴

Gambar I. Sierra Leone Maps



Sumber: <http://geography.about.com/library/cia/blcsierraleone.htm>, diakses pada 27 November 2008, pk.15.40.

²² "Profile Sierra Leone", <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5475.htm> diakses pada 5 April 2008 pk 16.35.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

B.1. Kronologis Konflik Internal Sierra Leone

Pada tahun 1930, telah ditemukan suatu deposit berlian dalam jumlah yang besar di bagian Timur Distrik Kono. Berlian ini kemudian menjadi komoditas ekspor terbesar di Sierra Leone, setelah kelapa sawit²⁵ Selanjutnya di tahun 1933, di daerah Marampa, Distrik Port Loko, dibangun sebuah pertambangan biji besi, yang kemudian juga mempunyai peran yang signifikan dalam total ekspor dari Sierra Leone. Besi dan berlian kemudian menjadi dua komoditas utama yang pada akhirnya sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian Sierra Leone.²⁶

Sekitar tahun 1951-1961 terjadi peralihan kekuasaan di Sierra Leone, dimana pemerintahan kolonial juga memberikan kursi pemerintahannya kepada beberapa warga negara Sierra Leone. Hal ini terlihat pada terpilihnya beberapa warga negara Sierra Leone menjadi menteri pada tahun 1953. Kementrian ini bertugas untuk mengatur pemerintahan dalam negeri, kecuali masalah hubungan luar negeri dan pertahanan.²⁷ Dalam susunan kementrian tersebut Sir Milton Margai merupakan salah satu warga negara Sierra Leone yang ada di dalamnya dan menjabat sebagai *Chief Minister*.

Seperti yang telah disebutkan pada bab I, Sierra Leone memperoleh kemerdekaannya dari pemerintah kolonial Inggris pada tahun 1961, dan sejak itu Sierra Leone tetap mewarisi sistem pemerintahan parlementer, dengan Milton Margai yang merupakan pemimpin partai Sierra Leone People's Party (SLPP), ditunjuk sebagai presiden. Pada tahun 1964 Milton Margai kemudian meninggal dan posisinya digantikan oleh adiknya Sir Albert Margai, yang memimpin pemerintahan dari tahun 1964 sampai 1967. Pemerintahan Albert Margai ini, ditandai dengan adanya praktek korupsi dan upaya-upaya otoriter untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan juga untuk menyingkirkan pihak oposisi.

Pada pemilihan umum tahun 1967, Gubernur Jenderal Sierra Leone menetapkan Siaka Stevens, yang merupakan pemimpin partai All People's

²⁵ John L. Hirsch, 2001, "Sierra Leone : Diamonds and the struggle for Democracy.", *International Peace Academy Occasional Paper Series*, hal. 25-31.

²⁶ Op.Cit., "Profile Sierra Leone",

²⁷ "Profile Sierra Leone : Government and Political Condition", pada <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/govtpol.htm>, diakses pada 13 September 2007, pk.23.46.

Congres (APC), sebagai Presiden Sierra Leone berikutnya.²⁸ Stevens pada awalnya merupakan sekretaris umum Serikat Pekerja Tambang dan pernah bergabung dalam SLPP, kemudian diangkat menjadi Menteri Pertambangan dan Tenaga Kerja, hingga pada akhirnya sesaat sebelum kemerdekaan Sierra Leone, Stevens keluar dan membentuk APC.

Pada masa pemerintahannya di Sierra Leone, terdapat kesenjangan antara kelompok etnik Kreole di Freetown yang mendominasi sektor politik dan ekonomi di awal periode Kolonial selama 150 tahun dengan kelompok lainnya yang mempunyai tingkat kependudukan yang lebih tinggi dan bersifat *less-developed*. Selain itu juga terdapat kesenjangan di bidang ekonomi dan politik antara wilayah bagian utara Sierra Leone yang didominasi oleh kelompok Temne dan Kriom, dengan wilayah bagian Selatan yang didominasi oleh kelompok yang menggunakan bahasa Mende.²⁹

Selama memimpin, Stevens berhasil mengeksploitasi berlian, dengan cara mendekati para penambang gelap dan dengan membentuk *National Diamond Mining Company* (NDMC) untuk menasionalisasi SLST (*Sierra Leone Selection Trust*).³⁰ Pada pertengahan 1980-an kondisi domestik di Sierra Leone, ditandai dengan adanya tingkat inflasi yang tinggi dan menurunnya kekuasaan pemerintah, tidak tersedianya bahan pangan, meluasnya korupsi dan juga semakin tingginya tingkat pengangguran pada generasi muda serta meningkatnya gerakan radikalisme dari mahasiswa.

Semakin memburuknya kondisi domestik Sierra Leone tersebut pada akhirnya membuat Stevens pensiun pada tahun 1985, dan ia menunjuk Mayor Jenderal Joseph Saidu Momoh menjadi penggantinya. Pada masa pemerintahan Momoh, terdapat kecenderungan meningkatnya jumlah pengangguran sehingga menjadi pemicu timbulnya kekerasan dan kriminalitas,

²⁸ David Zimmer, "Harvard WORLD MUN 2003: Special Political and Decolonization Committee.", hal.7, dalam <http://www.worldmun.org/2006/archives/03/gSpPECPOL.pdf>, diakses pada 13 September 2007, pk. 23.50.

²⁹ Abbas Bundu, *Democracy by Force? A Study of International Military Intervention in the Civil War of Sierra Leone from 1991-2000* (USA: Universal Publishers, 2001), hal.16-17.

³⁰ Ian Smillie dkk., January 2000, "*The Heart of the Matter: Sierra Leone, Diamonds and Human Security*.", hal 18.

serta penggunaan obat-obatan terlarang, serta meningkatnya tingkat korupsi yang dilakukan olehnya.³¹

Lemahnya kepemimpinan dari Momoh ini, kemudian dimanfaatkan oleh dua pihak oposisi. Pertama; Kopral Foday Sankoh yang memimpin pemberontakan melalui Revolutionary United Front (RUF) dan didukung oleh pasukan pemberontak National People Front (NPFL) di Liberia. RUF merupakan sebuah kelompok pemberontak yang berasal dari *spillover* pemberontakan di negara tetangga Liberia. Pada tahun 1987, terjadi percobaan kudeta terhadap pemerintahan Momoh yang menandai awal dari kejatuhan pemerintahannya. Hal ini didukung dengan sikap dendam Charles Taylor, *warlords* / tokoh perang Liberia (menjadi presiden pada tahun 1997), yang diakibatkan oleh ditolaknya tawaran Taylor, untuk dapat beroperasi di sebelah Timur Sierra Leone dengan iming-iming uang, oleh Momoh.³² Pada tanggal 23 Maret 1991, RUF menyerang sebelah Timur Sierra Leone dari Liberia. Pada saat inilah konflik internal di Sierra Leone dimulai.³³ Tujuan RUF melakukan aksi pemberontakan ini adalah untuk mengakhiri kekuasaan rezim APC yang telah berlangsung kurang lebih 24 tahun di Sierra Leone.³⁴

Kedua; Kapten Valentine Strasser yang memimpin kelompok yang terdiri dari para tentara, melakukan aksi kudeta militer. Pada tahun 1992, Strasser berhasil menjatuhkan pemerintahan Momoh dan kemudian memerintah negara melalui badan pemerintahan yang baru, the National Provisional Ruling Council (NPRC).³⁵ Pada tahun 1992, Strasser berhasil menjatuhkan pemerintahan Momoh dan kemudian memerintah negara. Pada masa pemerintahannya, Strasser menyewa EO (*Executive Outcomes*), perusahaan keamanan tentara bayaran dari Afrika Selatan, dengan tujuan untuk membantu tentara

³¹ Robert I. Ritberg, "Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators." dalam Rotberg, 2003, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, World Peace Foundation, Brooking Institution Press, , hal.5-10.

³² *Op.Cit.* John L. Hirsch, 2001, "*Sierra Leone : Diamonds and the struggle for Democracy.*", hal. 30.

³³ "Report of the Panel of Experts.", Appointed Pursuant to UNSC Resolution 1306,2000, paragraph 19, in relation to Sierra Leone, Desember 2000.

³⁴ Radhika Coomaraswamy, "*War-Related Sexual Violence in Sierra Leone*", pada situs http://www.phrusa.org/research/sierra_leone/pdf_files/06_response.pdf diakses pada 10 September 2007, pk.22.50.

³⁵ Joe A.D. Alie, "Background to the Conflict (1961-1991): What Went Wrong and Why?" dalam Anatole Ayissi dan Robin-Edward Paulton, *Bound to Cooperate: Conflict, Peace and People in Sierra Leone* (Jenewa: UNIDIR, 2000), hal.15.

pemerintahan Sierra Leone untuk melawan RUF.³⁶ Namun demikian, Sankoh beserta RUF, terus melawan pemerintahan militer Strasser yang baru. Pada tahun 1996 diadakan pemilihan umum multipartai yang dimenangkan oleh Ahmad Tejan Kabbah yang merupakan pemimpin dari *Sierra Leone People's Party* (SLPP), yang kemudian menjadi Presiden Sierra Leone berikutnya.³⁷

Pada masa pemerintahannya, Presiden Kabbah menandatangani perjanjian damai Abidjan (*Abidjan Peace Accord*) dengan pihak RUF pada akhir November 1996. Perjanjian ini menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian yang netral, penarikan EO dan penarikan semua pasukan asing dari Sierra Leone.³⁸ RUF merupakan pihak yang paling mendapatkan keuntungan dari perjanjian ini, karena dalam perjanjian ini, dapat dikatakan bahwa RUF mempunyai posisi yang setara dengan pemerintah Sierra Leone. Selain itu RUF juga tidak dikenai sanksi atas segala aksi kekerasan yang dilakukan selama ini.³⁹

B.2. Akar Permasalahan Konflik Sierra Leone

Konflik yang terjadi di suatu wilayah dapat dipahami dari berbagai perspektif, yaitu antara lain dari; (i) perspektif kebutuhan manusia, yang berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia – fisik, mental, dan sosial – yang tidak terpenuhi atau dihalangi. (ii) perspektif identitas, yang berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. dan (iii) perspektif transformasi konflik, yang berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah-masalah sosial, budaya dan ekonomi.

³⁶ "Chronology of Sierra Leone: How Diamonds Fuelled the Conflict", pada <http://www.africa-confidential.com/special.htm>, diakses pada 10 September 2007, pk.23.40.

³⁷ Paul Richards, Agustus 2003, "*The Political Economy of Internal Conflict in Sierra Leone*," Working Paper Series, Working Paper 21, Netherlands Institute of International Relations "Clingendael", Conflict Research Unit, hal. 9-10, dalam http://www.clingendael.nl/publications/2003/20030800_cru_working_paper_21.pdf, diakses pada 30 September 2007.

³⁸ A. Adebajo, *Building Peace in West Africa: Liberia, Sierra Leone, and Guinea-Bissau*, London, 2002.

³⁹ "Chronology of Sierra Leone: How Diamonds Fuelled the Conflict", *Loc.Cit.*

Greg Mitchell, menjelaskan mengenai eksploitasi berlian yang telah mencemari konflik internal di Sierra Leone. Menurut Mitchell, Sierra Leone adalah negara yang sangat kaya, namun diperintah oleh pemerintahan yang korup dan predator sehingga muncul gerakan pemberontakan revolusioner RUF yang meneror populasi sipil dan memperoleh keuntungan dari industri berlian Sierra Leone. Dalam tulisannya, Mitchell menjelaskan eksploitasi ekonomi terhadap berlian dalam tingkat lokal, regional dan internasional yang terjadi selama periode perang. Eksploitasi berlian itu sendiri dilakukan oleh RUF dan Presiden Liberia Charles Taylor.⁴⁰

B.2.1. Faktor Pemerintahan yang buruk

Secara umum akar permasalahan pada perang internal di Sierra Leone telah dialami sejak awal pembentukan negaranya. Menurut Michael E. Brown kondisi domestik yang pada akhirnya dapat membawa suatu negara pada perang internal umumnya terletak pada persoalan mendasar yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama.

Persoalan mendasar pada kasus perang internal di Sierra Leone ini terutama disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1 bidang politik dan ekonomi.

Oleh karena itu, usaha untuk menciptakan perdamaian di Sierra Leone harus diarahkan pada penyelesaian persoalan mendasar yang terjadi di negara tersebut.

- 2 Warisan historis dari pemerintah

Selain faktor persoalan mendasar tadi, faktor lain yang juga menjadi pemicu timbulnya konflik internal di Sierra Leone adalah warisan historis dari pemerintah, karena warisan historis tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, juga turut berperan dalam membentuk struktur politik dan ekonomi di suatu negara.

⁴⁰ Greg Mitchell, Maret 2005, "Terrorist Prefer Diamonds : How Predation, State Collapse and Insurgence Have Fashioned The International Exploitation of Sierra Leone's War Economy," Peace Studies Paper, Working Paper 8, Fourth Series, Department of Peace Studies, University of Bradford, lihat http://www.brad.ac.uk/acad/peace/pubs/psp8_title.pdf, diakses pada 18 Januari 2008.

3 Perdagangan budak

Konflik internal yang berlarut-larut di Sierra Leone berhubungan erat dengan sejarah negara ini yang merupakan bekas koloni Inggris. Motif pemerintah Inggris mendirikan koloni di Sierra Leone adalah untuk kepentingan ekonominya.⁴¹ Sebagian besar penduduk asli di benua Afrika sejak tahun 1750 telah dijadikan komoditas utama perdagangan budak oleh pemerintah kolonial. Ketika tahun 1787 perbudakan mulai dihapuskan dan Sierra Leone dijadikan sebagai tempat penampungan bagi budak-budak yang dibebaskan, pemerintah kolonial Inggris tetap berperan dalam struktur pemerintahan yang baru dibentuk di negara tersebut.

Faktor persediaan sumber daya alam yang melimpah, terutama tambang berlian di Sierra Leone menjadi alasan Inggris untuk tetap menjalankan peran sebagai pemerintah kolonial dan meraih keuntungan dari sumber daya alam tersebut.⁴² Atas dasar kepentingan ekonomi tersebut, maka peran pemerintah kolonial tidak dapat dipisahkan dari akar permasalahan yang terjadi dalam perang internal di Sierra Leone.

Sejak periode perdagangan budak di benua Afrika, pertikaian antar kelompok etnik di Afrika sudah menjadi fenomena yang umum terjadi. Sebagian hal tersebut disebabkan oleh adanya politik "adu domba" dan kebijakan segregasi yang diterapkan oleh pemerintah kolonial untuk menciptakan pertikaian antar kelompok etnik.⁴³ Kebijakan ini diberlakukan agar antar kelompok etnis tersebut tidak dapat mengadakan konsolidasi untuk menciptakan perlawanan terhadap pemerintah colonial. Dengan demikian kepentingan ekonomi untuk mengambil penduduk asli sebagai komoditas perdagangan budak tidak akan terganggu. Tetapi untuk periode selanjutnya, kepentingan penguasaan sumber daya alam akan menjadi faktor yang lebih dominan bagi keterlibatan pemerintah kolonial, seperti Inggris, di benua Afrika.⁴⁴

⁴¹ *Op.cit.*, John L.Hirsch, hal. 25.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Crawford Young, "The Herittage of Colonialism", dalam John W.Harbeson & Donald Rothschild (eds.), *Africa in World Politics* (Boulder: Westview Press) 1991, hal.19.

⁴⁴ *Ibid.*

4. Karakteristik pemerintahan.

Dalam kasus di Sierra Leone, pasca pemberian kemerdekaan dari pemerintah Inggris, karakteristik pemerintahannya memiliki kesamaan pola. Pertama, di bidang politik sejak awal seluruh pemerintah yang memimpin di Sierra Leone memiliki persamaan dalam praktek penyelenggaraannya negara. Sentralisasi power pada kelompok politik tertentu, misalnya SLPP atau APC, umumnya bernuansakan sentimen antar kelompok etnik meskipun secara keseluruhan sentralisasi ini tetap berfokus pada landasan penggolongan berdasarkan partai politik.

Dalam hal ini setiap partai yang berkuasa di Sierra Leone memiliki kecenderungan untuk mempertahankan dominasi kelompoknya dengan cara mengeliminir kelompok politik lainnya. Seringkali sentimen antar kelompok politik ini meluas pada kecenderungan untuk menekan kelompok etnik yang minoritas. Kecepatan dan kemudahan yang dialami oleh Sierra Leone dalam memperoleh kemerdekaan membuat negara ini harus menghadapi tantangan yang besar. Kebanyakan negara-negara Afrika baru tersebut ditinggalkan untuk memerintah negara mereka sendiri tanpa manajer dan teknisi yang memiliki kemampuan yang mencukupi, baik dalam pemerintahan maupun bisnis. Sierra Leone semakin melemah pada tahun 1970-an dan 1980-an, dan kemudian *collapse/hancur* pada tahun 1990-an.⁴⁵ Kegagalan negara Sierra Leone tidak hanya didorong oleh kevakuman kekuasaan yang mendadak saja, tetapi juga berasal dari strategi para pemimpin politik yang disengaja untuk melemahkan struktur Negara, pelayanan masyarakat dan institusi ketika mereka memonopoli dan mengeksploitasi sumber daya ekonomi.⁴⁶

Semua pemerintahan yang pernah berkuasa di Sierra Leone, tidak memiliki kesiapan politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan untuk memimpin Sierra Leone. Pada akhirnya hal ini berdampak pada ketidakmampuan mereka untuk menjalankan pemerintahan yang baik

⁴⁵ Robert Jackson, *Quasi-States: Sovereignty, International Relations and Third World*, New York: Cambridge University Press, 1990, hal.21.

⁴⁶ William Reno, "Sierra Leone: Warfare in a Post-State Society", dalam Robert I. Ritberg, *State Failure and State Weakness in a Time of Terror*, World Peace Foundation, Brooking Institution Press, 2003, hal 5-10.

sehingga akibatnya Sierra Leone menjadi *collapse*/hancur dan lemah terhadap berbagai serangan pemberontakan yang berlarut-larut.⁴⁷

Pergantian pemerintahan dari satu figur ke figur yang lainnya memenuhi kriteria yang lazim terjadi dalam politik di Afrika sebagai *Big Man* atau *Strong Man*. Figur pemimpin ini memiliki kemampuan untuk menguasai massa, cenderung manipulatif dalam memanfaatkan kelompok pendukungnya, dapat menjalankan kepemimpinannya secara otoriter ataupun dengan persuasif sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.⁴⁸ Pemimpin dengan model Big Man ini seringkali memegang kursi pemerintahan di banyak negara-negara Afrika; demikian pula halnya dengan yang terjadi di Sierra Leone. Sejak awal Albert Margai, Siaka Stevens, dan pemimpin Sierra Leone berikutnya memiliki kecenderungan untuk hal tersebut.

B.2.2. Faktor Berlian

Permasalahan dalam sektor berlian, baik secara langsung atau tidak langsung telah mencemari konflik di Sierra Leone. Pertama; berlian adalah insentif untuk melakukan kekerasan. Hal ini dipraktekkan baik oleh RUF dan tentara pemerintah. Kedua kelompok ini menunjukkan ketertarikan dalam penambangan berlian secara illegal. Pertempuran yang teratur dalam konflik internal ini memang jarang terjadi, namun pertempuran yang terjadi seringkali berlokasi di sekitar wilayah berlian. Ribuan penduduk sipil telah dijauhkan dan diusir dari wilayah yang kaya akan berlian oleh para pemberontak RUF.⁴⁹

Kedua; berlian telah membantu dalam hal pembiayaan aksi kekerasan. Kelompok RUF telah menggunakan berlian untuk membeli persenjataan, baik dari tentara pemerintah maupun dari luar negara. Sejumlah pedagang berlian

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Hirsch, Op.Cit., hal 29.

⁴⁹ Amanda Bryant Banat, 2002, "Solving the Problem of Conflict Diamonds in Sierra Leone: Proposed Market Theories and International Legal Requirements for Certification of Origin," *Arizona Journal of International and Comparative Law* Vol.19, No.3, hal.940-942, dalam <http://www.law.arizona.edu/Journals/AJICL/AJICL2002/vol193/Banatnote.pdf>, diakses pada 23 Februari 2008 pk.01.55.

yang ikut memperoleh keuntungan dari aksi kekerasan, juga membantu membiayai aksi pemberontakan RUF.⁵⁰

Ketiga; berlian juga telah membantu memperburuk konflik karena telah menimbulkan frustrasi yang diakibatkan oleh keuntungan yang tidak seimbang dari penambangan berlian. Secara historis, keuntungan berlian telah diperoleh lebih banyak oleh pihak luar. Alluvial Diamond Mining Scheme yang dibentuk pada tahun 1955 telah menciptakan kesempatan penambangan legal oleh penduduk lokal, namun demikian pada prakteknya yang mampu membeli perijinan dan peralatan dasar yang diperlukan adalah para pedagang, polisi setempat, para pejabat dan pegawai sipil. Mereka ini kemudian membagi keuntungan kepada rakyat biasa dengan syarat rakyat biasa berkewajiban untuk menggalinya.⁵¹

Warga Lebanon di Sierra Leone kemudian menggunakan akses superiornya untuk memperoleh modal sehingga dapat mendominasi sektor pertambangan berlian lokal yang baru. Di sisi lain, Siaka Stevens pada saat itu menawarkan kekebalan kepada para pendukung yang loyal pada penggalian berlian ilegal. Sementara itu, para pemimpin di wilayah berlian menjadi semakin kaya karena berlian dan memperoleh keuntungan dari kemampuan mereka dalam mengolah perijinan dan menguasai wilayah yang terbaik. Keluarga penguasa pasti mempunyai hak kepemilikan di tanah yang kemudian akan mereka sewakan kepada orang lain berdasarkan keturunan, dimana kepemilikan utama tetap dipegang oleh keluarga penguasa untuk mempertahankan kekuasaan mereka.⁵²

Rendahnya pendapatan pajak yang diperoleh pemerintah dari penambangan berlian juga menjadi pemicu timbulnya konflik internal. Berlian selalu menjadi hal penggoda bagi para penyelundup karena bentuknya yang sangat kecil dan nilainya yang sangat berharga.⁵³ Cara penyelundupan berlian hingga sampai ke pasar internasional ditentukan oleh kemudahan mereka untuk

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Chaim Even-Zohar, 2003, "Sierra Leone Diamond Sector Financial Policy Constraints," USAID, lihat Appendix A: A Brief History of Sierra Leone Diamond Industry, hal.31-34, dalam http://www.peacediamonds.org/data/2351648_Financial%20Constraints%20Study%20--%20Internet.pdf, diakses pada 23 Februari 2008, pk 02.15.

⁵² *Ibid.*

⁵³ David Keen, "Greedy Elites, Dwindling Resources, Alienated Youths The Anatomy of Protracted Violence in Sierra Leone," hal. 1-3, dalam http://www.fes.de/ipg/ONLINE2_2003/ARTKEEN.PDF, diakses pada 28 November 2007, pk 02.30.

dibawa keluar dari satu negara ke negara lain secara tersembunyi. Perbatasan negara yang melintasi batas daratan Afrika Barat sangat lemah dan terisolasi sehingga para penyelundup, imigran dan pedagang dengan mudah dapat menyeberangi perbatasan untuk membawa barang-barang selundupan ke pasar.⁵⁴

Pada jalur perlintasan resmi antara Sierra Leone, Guinea dan Liberia, terdapat 60-80 perbatasan yang tidak dijaga melalui semak-semak yang lebat, menyeberangi sungai dan melalui pegunungan, dimana ribuan mil dari daerah perbatasan sangat lemah dalam hal penjagaan sehingga seringkali terjadi penyelundupan berskala besar.⁵⁵ Arus berlian selundupan yang keluar dari Afrika Barat sangat sulit untuk dilacak keberadaannya, sehingga komunitas internasional enggan menyalahkan penyelundupan kepada aktor lokal dan regional. Pada tahun 1999, ekspor resmi berlian Liberia hanya 8500 karat, padahal sebenarnya jumlah berlian yang diselundupkan hampir mencapai 80.000 karat.⁵⁶

Secara historis, Liberia telah menjadi jalur utama bagi para penyelundup berlian. Liberia memperoleh berlian selundupan dari para penambang gelap di Sierra Leone dan juga dari kelompok pemberontak RUF. Dari Liberia, berlian dapat dijual dengan mudah karena dollar Amerika adalah mata uang resminya dan dalam penjualannya hanya ada sedikit pengawasan dari Tel Aviv dan Antwerp.⁵⁷ Hal ini menunjukkan adanya interaksi antara tingkat lokal, regional dan internasional dalam hal penyelundupan berlian.

Perdagangan berlian adalah sebuah masalah yang sangat mengkhawatirkan karena adanya pencemaran ekonomi (selama berlangsungnya konflik tersebut, dapat dilihat bahwa akibat keuntungan yang besar dari berlian, rakyat Sierra Leone mengalami terror, pembunuhan dan kemiskinan) dalam konflik di Sierra Leone, yang sebagian besar disebabkan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ "Potential Diamond Anti Smuggling Activities For Consideration in Sierra Leone", Oktober 2004, USAID, hal.10, pada http://pdf.dec.org/pdf_docs/PNADB147.pdf, diakses pada 27 November 2008, pk.11.36.

⁵⁶ "Part One: Diamonds," Report Of The Panel Of Experts, Appointed Pursuant to U.N. Security Council Resolution 1306 (2000)., Paragraph 19, in Relation to Sierra Leone, December 2000.

⁵⁷ Perez-Katz, Anna M., "The Role of Conflict Diamonds in Fuelling Wars in Africa: The Case of Sierra Leone," *International Affairs Review*, Vol.XI, No.1, Winter/Spring 2002, pada http://www.gwu.edu/~iar/WS02_Perez-Katz.pdf, diakses pada 27 November 2007, pk.12.15.

oleh berlian.⁵⁸ Hal ini semakin memperburuk perekonomian Sierra Leone karena perang internal tersebut, sehingga Sierra Leone tercatat sebagai salah satu negara termiskin di dunia, menurut Bank Dunia.⁵⁹

C. Aktor-aktor yang terlibat dalam Konflik Internal Sierra Leone

C.1. Kelompok Pemberontak Revolutionary United Front (RUF)

Revolutionary United Front (RUF) memulai pemberontakan terhadap pemerintahan pusat di Freetown, ibukota Sierra Leone dengan melakukan penyerangan terhadap wilayah Sierra Leone yang berbatasan dengan Liberia pada bulan Maret 1991.

Revolutionary United Front (RUF) dibentuk pada tahun 1980-an oleh anggota kelompok aktivitas yang berusaha untuk menjatuhkan rezim All People Congress (APC). Rezim ini berkuasa dari tahun 1968, dibawah konstitusi Negara satu partai sejak tahun 1978. Anggota kelompok ini berasal dari warga Sierra Leone sendiri. Sebagian besar terdiri dari kaum muda yang selama ini menjadi kelompok yang terabaikan oleh pemerintah, sebagian terbiasa dengan adanya budaya kriminal di Freetown, sebagian lagi muncul dari daerah tempat industri pertambangan, bahkan terdapat pula beberapa pelajar perguruan tinggi yang menjadi radikal sebagai akibat dari kondisi di Sierra Leone. Kelompok pemberontak RUF dipimpin oleh Kopral Foday Sankoh, yang merupakan mantan anggota militer yang pernah dipenjara selama tujuh tahun karena keterlibatannya dalam percobaan kudeta pada tahun 1971 terhadap pemerintahan Siaka Stevens.⁶⁰

Penyerangan RUF sebagian besar diwarnai dengan tindakan kekerasan yang ditujukan kepada masyarakat sipil. RUF seringkali menculik dan memobilisasi anak-anak untuk dijadikan pasukannya. RUF pada mulanya menyerang pedagang dari kelompok Fula dan Madingo. Akibat dari serangan tersebut, menimbulkan korban kurang lebih 100 jiwa. Di distrik Bo, RUF

⁵⁸ Ian Smillie dkk. *Op.Cit.*, hal.10.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Chronology of Sierra Leone: How Diamonds Fuelled the Conflict” pada <http://www.africa-confidential.com/special.htm>, pada 25 November 2007, pk.20.43.

menyerang pedagang-pedagang Lebanon, meskipun secara umum RUF tidak pernah melakukan penyerangan atas dasar pembagian kelompok etnis.⁶¹

Tindakan RUF ini menyebabkan gelombang krisis kemanusiaan (*humanitarian crisis*) di Sierra Leone, termasuk diantaranya gelombang perpindahan penduduk ke daerah aman baik di wilayah Sierra Leone ataupun di negara-negara yang berbatasan dengan Sierra Leone.

Sumber utama pendanaan bagi pemberontakan RUF di Sierra Leone adalah perdagangan berlian illegal. Ketertarikan RUF terhadap berlian Sierra Leone salah satunya dikarenakan kelompok ini memang didominasi oleh banyak mantan penambang gelap berlian. Peran RUF dalam eksploitasi berlian di Sierra Leone berkaitan dengan struktur yang relatif rumit untuk proses penggalian dan transportasi sumber daya alam berlian ini untuk ditukarkan dengan suplai kebutuhan pokok, obat-obatan, peralatan medis, narkotik illegal dan terutama persenjataan yang diperlukan untuk melakukan aksi pemberontakannya.

Keith Krause, dalam "*The Challenge of Small Arms & Light Weapons*"⁶² memaparkan tentang krusialnya peranan senjata kecil dan ringan dalam suatu negara yang bisa menimbulkan adanya konflik atau perang internal, seperti yang terjadi di Haiti, Somalia dan Sierra Leone.

Peran RUF dalam konflik internal ini sangatlah signifikan. Aksi pemberontakan yang disertai dengan aksi kekerasan ini telah menghabiskan lebih dari tigaperempat pendapatan negara Sierra Leone. Konflik yang terjadi juga telah menyebabkan ditutupnya Sierra Rutile, Sierra Leone Ore dan pertambangan bauksit Metal Company pada tahun 1995 yang merupakan sumber pendapatan domestik terpenting bagi Freetown. RUF telah menghancurkan kehidupan sosial politik Sierra Leone, meningkatkan arus pengungsi yang sangat besar dan juga melemahkan kekuasaan pemerintah serta institusi sipilnya.⁶³

⁶¹ David Pratt, M.P., "Sierra Leone: The Forgotten Crisis", Laporan Special Envoy to Sierra Leone kepada Menteri Luar Negeri Republik Kanada, Lloyd Axworthy, P.C., M.P., 23 April 1999, pada <http://www.fas.org/man/dod-101/ops/war/docs/crisis-e.htm> diakses pada 25 Maret 2008, pk.21.35.

⁶² http://www.isn.ethz.ch/3isf/Online_Publications/WS5/WS_5D/Krause.htm diakses pada tanggal 6 Februari 2008

⁶³ William Reno, *Corruption and State Politics in Sierra Leone*, Cambridge University Press, 1995, hal.124.

C.2. Negara tetangga; Liberia

Menurut Brown, meskipun negara-negara lain yang berada dalam satu wilayah kerap menjadi korban pasif sebagai tempat limpahan masalah dari area konflik negara lainnya, namun tidak menutup kemungkinan dan tidak jarang juga bahwa negara tetangga terlibat aktif dalam kontribusi eskalasi konflik dan instabilitas kawasan melalui intervensi oportunistiknya.⁶⁴

Motivasi perilaku dan intervensi suatu negara terhadap area konflik di tempat lain bisa dilihat dari berbagai alasan, seperti: untuk masalah kemanusiaan menjaga perdamaian dan keamanan internasional ; intervensi defensif yang bertujuan menyelamatkan kepentingan nasional; intervensi protektif untuk melindungi sekelompok etnis yang menjadi korban; intervensi oportunis yang bertujuan mencampuri desain politik, ekonomi dan militer di masa mendatang. Dalam pelaksanaannya, bisa jadi negara tetangga melakukan kombinasi alasan-alasan tersebut dalam menyikapi konflik di negara lain.⁶⁵

Liberia merupakan faktor pemicu yang berasal dari luar wilayah Sierra Leone yang mengakibatkan pecahnya perang internal di Sierra Leone. Setahun sebelum pecahnya perang internal di Sierra Leone, Liberia terlebih dahulu mengalami perang internal. Di Liberia terdapat kelompok pemberontak *National Patriotic Front of Liberia* (NPFL) yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang tengah berkuasa. Ketika upaya ini dijalankan, NPFL berupaya mendorong pemberontakan yang dilakukan oleh RUF untuk melakukan aksi serupa di Sierra Leone. Maksud dari aksi NPFL ini adalah untuk mencapai kepentingan politik NPFL di Liberia.⁶⁶

Konflik Liberia itu sendiri diawali dengan adanya perpecahan antara kelompok faksi politis di Liberia pada masa pemerintahan Presiden Samuel Doe. Perpecahan tersebut menimbulkan munculnya kelompok paramiliter, dimana salah satunya adalah NPFL yang kemudian melakukan aksi kekerasan dengan tujuan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Samuel Doe. Melihat situasi yang memanas ini, organisasi regional Afrika, ECOWAS, kemudian memutuskan untuk menerjunkan pasukan perdamaian ECOMOG untuk mengatasi krisis di

⁶⁴ Michael E. Brown (ed), *The International Dimensions of Internal Conflict*, Cambridge: MIT Press, 1996, hal 23.

⁶⁵ *Ibid.*, hal 25.

⁶⁶ Abbas Bundu, op.cit., hal.20

Liberia. ECOMOG itu sendiri merupakan kekuatan tentara gabungan dari Gambia, Nigeria, Guinea, Ghana, dan juga Sierra Leone. Usaha ECOMOG ini pun mendapat perlawanan dari NPFL dan *warlords* Liberia, Charles Taylor, kemudian menyerang wilayah Sierra Leone melalui pemberian bantuan persenjataan dan latihan militer kepada RUF, sebagai balasan atas kesediaan pemerintah Sierra Leone dalam membantu ECOWAS.⁶⁷

Berdasarkan laporan dari UN Expert Panel mengenai Sierra Leone; Liberia telah menjadi pendukung aktif RUF di segala bidang. Liberia menyediakan pelatihan persenjataan, dukungan logistik, perencanaan serangan dan juga berperan sebagai tempat persembunyian RUF.⁶⁸ Liberia dianggap sebagai pusat bagi aktivitas kriminal yang berkaitan dengan berlian dan berhubungan dengan penyelundupan dan perampokan di seluruh Afrika. RUF telah menggunakan Liberia sebagai tempat penjualan berlian dengan perjanjian yang menguntungkan Liberia. Hal ini menyebabkan Liberia menjadi tempat yang aman bagi kejahatan yang terorganisir. RUF juga telah menerima pelatihan militer yang teratur di Liberia, dan Presiden Charles Taylor seringkali menggunakan anggota RUF sebagai penjaga pribadinya.⁶⁹

Motif keterlibatan Taylor sebagai *warlords* dari Liberia dalam mengeksploitasi berlian, adalah untuk memperkaya dirinya dan juga untuk membiayai pemberontakan RUF. Liberia bersama dengan RUF melakukannya melalui kerjasama pertukaran senjata dengan berlian. Senjata bukan merupakan komoditas yang mudah rusak dan dapat digunakan kembali dari satu konflik ke konflik yang lainnya dan dari satu aktor ke aktor yang lainnya. Berakhirnya Perang Dingin telah merubah perdagangan senjata internasional dalam tiga cara. *Pertama*; berakhirnya Perang Dingin secara dramatis telah meningkatkan motivasi ekonomi untuk menjual senjata, dan membuat para pembeli, yang berposisi dengan salah satu negara *superpowers*, membayar biaya produksi. *Kedua*; berakhirnya Perang Dingin telah menyebabkan disebarkannya senjata dalam jumlah besar ke pasar dunia. Senjata ini berupa persenjataan berat yang sudah kuno dan juga *small arms* (senjata ringan), yang telah dicadangkan selama Perang Dingin atau dengan kata lain merupakan sisa produksi dari

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ United Nations, "Expert Panel Report", hal.15.

⁶⁹ United Nations, "Expert Panel Report", hal.16.

pabrik-pabrik yang gagal beralih menjadi produsen lain dan terus-menerus memproduksi senjata. Ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam perantara perdagangan senjata bukan lagi merupakan perwakilan dari sebuah pemerintahan tetapi merupakan aktor independen yang sebelumnya pernah bekerja untuk pemerintah sehingga mereka memiliki kontak-kontak selama Perang Dingin.⁷⁰

Ketiga faktor diatas telah mengurangi pengendalian terhadap arus suplai di pasar senjata sehingga persenjataan sangatlah mudah untuk diperoleh dengan sedikit persyaratan. Penjualan senjata senjata di negara-negara berkembang yang mengalami konflik jarang dihasilkan di negara Barat. Meningkatnya kompleksitas industri senjata di Negara-negara berkembang dan banyaknya jumlah uang yang terlibat telah menjadikan gerakan pemberontak sebagai klien yang baik. Penilaian yang keras dari pers dan publik telah membuat produksi senjata disembunyikan keberadaannya.⁷¹

Sumber utama persenjataan dalam perang saudara di Afrika adalah dari negara-negara bekas Blok Timur yang berusaha memasuki komersialisasi bisnis senjata yang baru dan berusaha mengatasi ketidakmampuan mereka untuk bersaing di pasar dunia. Bagi negara-negara bekas Blok Timur ini, negara-negara Afrika adalah pasar yang natural, terutama bagi Small Arms and Light Weapons (SALW).⁷²

Dalam kasus konflik internal di Sierra Leone, pengeksploitasian yang dilakukan oleh RUF dengan dukungan dari Liberia untuk menukarkan berlian berbagai komoditas seperti peralatan untuk menambang, makanan, peralatan medis dan yang paling utama adalah untuk persenjataan.⁷³ Charles Taylor yang merupakan warlords dari Liberia, berperan sebagai broker atau pedagang perantara untuk menyalurkan senjata kepada RUF yang akan ditukarkan dengan berlian mentah. Ketika senjata telah masuk ke dalam wilayah konflik, maka

⁷⁰ R.T.Naylor, "The Rise of The Modern Arms Black Market and The Fall of Supply-Side Control" dalam Williams and Dimitri Vlassis (eds), *Combating Transnational Crime: Concepts, Activities and Responses*, London: Frank Cass, 2001, hal.213.

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Mykola Sungurovskiy, "Restructuring the Military Industry in Ukraine: Results, Challenges, Prospects", Defence Industry III, Defense Industry and the State, Conference held at Wildbad Kreuth, Germany, August 2001.

⁷³ Eric G.Berman, "Arming the Revolutionary United Front", *African Security Review*, Vol.10, No.1.2001.

menjadi sangat sulit untuk melacak senjata tersebut karena tidak ada tanda-tanda yang dapat membuktikan keberadaan senjata tersebut.⁷⁴

Hal ini sesuai dengan teori Brown mengenai dimensi regional dari perang internal, yakni perang di satu negara dapat memicu timbulnya perang di negara yang memiliki kedekatan geografis.

D. Dampak Konflik Internal Sierra Leone

Ada banyak alasan mengapa konflik internal mempunyai dampak bagi keamanan dan perdamaian di tingkat regional maupun internasional. Sebagian besar jurnalis dan *policy makers* berargumen secara simplistik dan mekanistik. Simplistik karena melihat persoalan hanya dari satu arah dimana wilayah yang sedang terjadi konflik akan menimbulkan dampak-dampak kemanusiaan, politik dan militer/keamanan serta menjadikan negara tetangga menjadi korban pasif. Mekanistik karena menyalahkan konflik tersebut sebagai suatu hal yang berkembang menjadi tidak terkontrol, daripada misalnya, terhadap keputusan dan terdalem para aktor/pihak yang terlibat dan pemerintahannya.

Michael E. Brown melihat alasan-alasan lain diluar yang simplistik dan mekanistik mengenai mengapa konflik di sebelah negara berdampak pada stabilitas regional. Alasan-alasan Brown tidak searah, melainkan ia melihatnya dari dua arah yang mencoba membedahnya dengan membedakan antara dampak internal atas negara tetangga dan motivasi negara tetangga dalam menyikapi konflik yang ada. Selain masalah kemanusiaan, politik dan militer, dampak lain yang penting untuk dicermati adalah dalam bidang ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa setiap negara mengalami interdependensi dan memiliki pengaruh terhadap instabilitas politik.⁷⁵

John Mackinlay menyebutkan kompleksitas konflik ini sebagai *complex emergencies*. Mackinlay mendefinisikan *complex emergencies* sebagai bencana kemanusiaan yang muncul dalam sebuah zona konflik dan menjadi rumit karena hal ini merupakan hasil dari kepentingan yang betabrakan dari pihak-pihak yang bertikai. Penyebabnya tidak hanya bersifat alamiah atau militer. Pada banyak kasus, populasi kecil yang ada ikut terbawa ke dalam bencana karena

⁷⁴ Stephen Mbogo, "The Triving Arms Bazaar", West Africa, No.496, 8-14 Oktober 2001, hal.22.

⁷⁵ *Ibid.*, hal 26.

konsekuensi dari tindakan milisi. Kehadiran milisi dan kepentingannya dalam mengontrol dan menekan ataupun memeras populasi lokal akan menghambat dan mengancam upaya-upaya pemberian bantuan. Sebagai tambahan dalam kekerasan terhadap populasi dan instalasi sipil, seperti rumah sakit, sekolah, tempat pengungsian, dan situs-situs budaya akan menjadi sasaran perang dan mungkin dirampas atau dihancurkan.⁷⁶

D.1. Fenomena Pengungsi Internal / *Internally Displaced Persons* (IDPs)

Pengungsian internal telah menjadi karakter migrasi paksa (*forced migration*) sejak sebelum Perang Dunia II. Hitler dan Stalin dikenal ada dibalik pengungsian paksa jutaan penduduk sebelum Perang Dunia II. Perang itu sendiri telah mengakibatkan semakin banyaknya penduduk yang mengungsi dalam batas wilayah negara mereka.⁷⁷

Sementara Perang Dunia II dan Perang Dingin antara dua blok negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet (sekarang Rusia), telah mengakibatkan krisis global dengan adanya arus besar-besaran pengungsi lintas batas (*refugees*), dunia saat ini menghadapi krisis serupa dengan meningkatnya jumlah pengungsi internal (atau yang disebut sebagai *internally displaced persons*/IDPs)⁷⁸ secara dramatis.

Memang selama lebih dari satu dekade terakhir ini telah terlihat suatu kecenderungan menggejalanya konflik bersenjata yang mengakibatkan puluhan juta orang menjadi pengungsi internal di seluruh dunia. Tahun 2001 tercatat ada lebih dari 20 juta orang dari 40 negara di seluruh dunia ini yang terpaksa/dipaksa

⁷⁶ John Mackinlay (ed.), "A Guide to Peace Support Operations", (Providence: Brown University, 1996), dalam Tom Woodhouse dan Oliver Ramsbotham (ed.), *Peacekeeping and Conflict Resolution*, Oxon: Frank Case Publisher, 2005), hal.64.

⁷⁷ Cohen, Roberta. *Exodus within Borders: the Global Crisis of Internal Displacement*. Kuliah umum disampaikan di UNHCR di Sofia, Bulgaria, Juni 4, 2001. Dapat dilihat di at http://www.unhcr.bg/lecture/roberta_cohen.htm

⁷⁸ istilah pengungsi internal/ *IDP(s)* diambil dari UN Economic Social Council. *Guiding Principles on Internal Displacement*. UN Doc. E/CN.4/ 1998/53/Add.2. 11 February 1998: "Para pengungsi internal adalah orang-orang atau kelompok-kelompok orang yang telah dipaksa atau terpaksa melarikan diri atau meninggalkan rumah mereka atau tempat mereka biasa tinggal, terutama sebagai akibat dari, atau dalam rangka menghindarkan diri dari, dampak-dampak konflik bersenjata, situasi-situasi rawan yang ditandai oleh maraknya tindak kekerasan secara umum, pelanggaran-pelanggaran hak-hak asasi manusia, bencana-bencana alam, atau bencana-bencana akibat ulah manusia, dan yang tidak melintasi perbatasan negara yang diakui secara internasional."

untuk berpindah atau mengungsi dalam batas wilayah negara mereka.⁷⁹ Perkiraan di akhir tahun 2004 menunjukkan jumlah tersebut meningkat menjadi kira-kira 25 juta orang dari 49 negara.⁸⁰ Jumlah tersebut dua kali lipat jumlah pengungsi lintas batas (*refugees*) di seluruh dunia saat ini menurut data terakhir tahun 2003.

Negara tetangga yang berada di sekitar wilayah konflik pada umumnya selalu menjadi korban pasif karena harus menanggung berbagai limpahan aliran arus pengungsi yang mempunyai dampak pada stabilitas keamanan, ekonomi, sosial dan politik negara penerima. Eskalasi militer negara tetangga juga akan meningkat karena adanya lalu lintas senjata dan suplai bantuan bagi salah satu pihak yang terlibat konflik melalui garis perbatasan. Apalagi jika diantara aliran pengungsi tersebut terdapat para *refugee warriors* yang menjadikan tempat pengungsian sebagai markas/basis perlawanan terhadap musuhnya.

Dalam terminologi yang disebut sebagai “*complex humanitarian emergency*”, perang yang terjadi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kualitas hidup kebanyakan di Sierra Leone. Pada tahun 2001 Sierra Leone tercantum sebagai negara yang least-developed di dunia menurut *United Nations Human Development Index*.⁸¹ Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh penduduk Sierra Leone sebagai akibat dari perang ini adalah permasalahan pengungsi (*refugees*) dan perpindahan penduduk di wilayah lain dalam negara (*Internally Displaced Persons* atau IDPs).

Perpindahan massa dalam jumlah besar merupakan salah satu karakter utama yang menggambarkan krisis kemanusiaan di Sierra Leone. Pada puncak pertikaian, lebih dari 3000 komunitas mengalami kehancuran. Sekitar 75.000 pengungsi telah mengalami repatriasi kembali ke Sierra Leone oleh UNHCR. Sekitar 50.000 lainnya masih menempati kamp-kamp di Guinea, juga di wilayah Ghana, Ivory Coast dan Gambia. Meningkatnya jumlah para pengungsi tersebut,

⁷⁹ *Forced Migration Review*, 10 April 2001, hal 24, Global IDP Project dan Norwegian Refugee Council. Maret 2005. *Internal Displacement: A Global Overview of Trends and Developments in 2004*. Geneva: Global IDP Project. Bisa dilihat di www.idpproject.org

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ UNDP, Human Development Report 2001, <http://www.undp.org/hdr2001/back.pdf> diakses pada 3 April 2008, pk.21.50.

menyebabkan adanya upaya untuk merelokasi pengungsi tersebut ke wilayah yang lebih aman.⁸²

Jumlah IDPs yang ada di Sierra Leone diperkirakan lebih dari 400.000 jiwa dimana diantaranya terdapat 170.000 jiwa yang menempati 18 kamp-kamp IDP resmi dan ribuan lainnya menempati distrik Port Loko dan Tonkolili dengan penduduk lokal. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh *The UN's Office for The Coordination of Humanitarian Assistance* (OCHA), dikatakan bahwa para pengungsi yang menempati daerah dengan penduduk setempat tidak cukup mendapatkan bantuan kemanusiaan.

Dimensi Regional dalam perang internal seperti yang dikemukakan oleh Brown, terbukti dengan timbulnya gelombang pengungsi dari Sierra Leone, baik itu *refugees* maupun IDPs. Dalam kasus Sierra Leone *complex humanitarian emergencies* yang dialami oleh korban sipil muncul karena perang ini dianggap sebagai bentuk bencana kemanusiaan. Membanjirnya jumlah pengungsi dirasakan oleh negara-negara yang berbatasan dengan Sierra Leone.

D.2. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Akibat lain dari konflik internal di Sierra Leone ini, terdapat pelanggaran HAM yang terjadi terhadap masyarakat sipil yang mencapai jumlah yang sangat tinggi. Kurang lebih 5000 warga sipil terbunuh, termasuk anggota pemerintahan dan wartawan, serta terjadi penculikan terhadap anak-anak dimana anak-anak ini kemudian dilatih untuk menjadi tentara anak (*child soldiers*).

Secara harafiah, HAM dapat dimaknai sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bersumber dari pemikiran moral manusia, dan diperlukan untuk menjaga harkat dan martabat suatu individu sebagai seorang manusia. Dengan kata lain, HAM secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan jenis kelamin, ras,

⁸² Global IDP Database, Sierra Leone Profile Summary; pada <http://www.idpproject.org/Sites/idpSurvey.nsf/wViewSingleEnv/Sierra+LeoneProfile+Summary.html> pada 3 April 2008, pk.22.14.

warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan dan kelahiran.⁸³

Dalam perkembangan pemberontak RUF, terdapat sekelompok pemberontak; mantan SLA/AFRC dan mantan SLA-pembelot (splinter) yang disebut kelompok “*West Side Boys*”. Kelompok ini dilaporkan telah melakukan tindak kekerasan secara luas, termasuk pembunuhan, penculikan, mutilasi dan pemerkosaan. Mereka menculik warga sipil, misionaris, petugas keamanan dari NGO, serta personel PBB. Selain itu mereka juga melakukan serangan terhadap bantuan konvoi kemanusiaan, serta penjarahan terhadap persediaan keamanan. Meskipun pada saat itu Perjanjian Lome telah ditandatangani oleh kedua pihak, praktek kekerasan tersebut terus berlangsung. Bahkan kamp-kamp pengungsi yang terletak di wilayah perbatasan juga sering menjadi sasaran peperangan oleh kelompok RUF ataupun tentara pemerintah.

Tentara RUF juga melakukan praktek penculikan dalam jangka waktu yang cukup lama terhadap warga sipil untuk dipergunakan sebagai pekerja paksa, tentara anak dan juga pekerja seksual. Penculikan ini merupakan metode yang dilakukan RUF untuk melaksanakan rekrutmen anggota.⁸⁴

Dengan contoh kasus terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan korban perang tersebut, Coomaraswamy menyebutkan istilah baru *complex humanitarian emergency* (lihat hal 54) untuk menunjukkan tingkat korban yang diakibatkan oleh perang ini terhadap keadaan korban sipil dari perang di Sierra Leone. Dengan memberikan analogi pada keadaan serupa yang dapat terjadi di kamp-kamp pengungsi ataupun di negara lainnya, maka Coomaraswamy mencoba menyampaikan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh kelompok bersenjata RUF merupakan ancaman nyata bagi individu-individu yang menjadi korban perang apabila ditinjau dari sisi *human security*.⁸⁵

⁸³ DR. Anak Agung Banyu Perwita dan DR. Yanyan Mochamad Yani, 2005, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, hal.151.

⁸⁴ Coalition to Stop the Use of Child Soldiers, *Sierra Leone: Child Soldiers Global Report 2001*, diakses dari http://www.child-soldiers.org/report2001/countries/sierra_leone.html pada 7 April 2008 pk.10.53.

⁸⁵ Radhika Coomaraswamy, Op.Cit.

PBB memperkirakan jumlah individu yang diculik oleh kelompok pemberontak selama periode 1991-1999 sebanyak 20.000 orang.⁸⁶ Sementara itu penculikan terhadap anggota PBB maupun petugas bantuan kemanusiaan, dilakukan untuk menjadikan mereka sebagai sandera RUF.

Di sisi lain, meskipun secara mayoritas pelanggaran HAM dilakukan oleh kelompok pemberontak, namun demikian pihak pemerintah juga melakukan praktek kekerasan yang serupa. Pemerintah Sierra Leone dan ECOMOG dilaporkan telah melakukan eksekusi di luar pengadilan terhadap tersangka kelompok pemberontak dan sekutunya. Hal ini terutama dilakukan ketika RUF/AFRC berhasil dipaksa mundur dari kota Freetown dan kemudian menerapkan taktik gerilya. Pada saat itu pemerintah kesulitan untuk mengidentifikasi anggota RUF/AFRC ketika tengah berada di antara masyarakat sipil, sehingga pemerintah seringkali melakukan eksekusi terhadap masyarakat sipil yang dianggap sebagai anggota RUF/AFRC. Selain itu juga dilaporkan tentang pelanggaran HAM oleh *Sierra Leone Army* (SLA) sehubungan dengan pelatihan dan reorganisasi di tahun 2000.⁸⁷ Bahkan SLA juga dikabarkan telah merekrut tentara anak untuk menghadapi divisi tentara anak dari RUF.

Anak-anak merupakan individu yang paling berpotensi untuk dijadikan sebagai pasukan perang. Ketika mereka telah diperkenalkan secara paksa terhadap suasana perang dan cara untuk bertempur, mereka dapat menjadi pasukan perang yang amat efektif karena pikiran anak-anak yang masih lugu sehingga sangatlah mudah untuk dikonstruksi sesuai dengan keinginan para pemberontak tersebut. Diperkirakan sekitar 5000 anak-anak yang ikut ambil bagian dalam pertempuran antara RUF dan pemerintah Sierra Leone. Anak-anak dalam kelompok ini seringkali diracuni dengan obat-obatan terlarang dan dipaksa untuk melakukan tindakan kekerasan, walaupun hal tersebut dilakukan mereka terhadap keluarganya sendiri dan juga masyarakat mereka. Anak-anak yang tergabung didalamnya, diberikan tanda yang merupakan bekas luka, sebagai tanda bahwa mereka adalah anggota RUF.⁸⁸

⁸⁶ US Department of State, *Sierra Leone, Country Reports on Human Rights Practices – 2000*, hal 3.

⁸⁷ US Department of State, *Op.Cit.*, hal.4.

⁸⁸ Radhika Coomaraswamy, *Loc.Cit.*

Menurut Amnesty Internasional, pada bulan Mei 2000, terdapat sekitar 25 persen pasukan perang yang bertempur melawan tentara pemerintah di dekat daerah Masiaka, diantaranya diperkirakan berusia di bawah 18 tahun, bahkan beberapa di antaranya juga ada yang masih berumur 7 tahun.⁸⁹



⁸⁹ Amnesty International, Report 2001, Sierra Leone, hal.5; pada <http://www.un.org/special-rep/children-armed-conflict/index.html> diakses pada 6 April 2008, pk. 23.54.